

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya pembangunan. Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Istilah pembangunan yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, dewasa ini telah semakin berkembang sebagai terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung pengertian. Pembangunan, dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau pada istilah: *development*, *growth and change*, *modernization*, atau bahkan juga *progres*. Raharjo (1980) dalam (Dr. Aprilia Theresia, dkk: 2014) Karena itu, kian menjadi sangat sulit untuk mendefinisikan “pembangunan” dalam suatu rumusan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, atau fungsi yang sangat beragam yang melekat pada istilah “pembangunan” itu. Sebab, pembangunan mencakup banyak makna, baik fisik maupun non fisik, baik proses maupun tujuannya, baik yang duniawi maupun rohani.

Pada istilah pembangunan melekat pula pengertian-pengertian ekonomi, politik, maupun sosial dan kebudayaan. Meskipun demikian, apapun maksud, tujuan dan makna yang terkandung dalam pengertian yang dimaksudkan dalam suatu istilah yang sama yaitu pembangunan, kesemuanya akan selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan

umat manusia secara individual maupun bagi masyarakatnya Hadad (1980) dalam (Dr. Aprilia Theresia, dkk: 2014).

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi (1981) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada suatu kesepakatan bahwa, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu, dalam (Dr. Aprilia Theresia, dkk: 2014). Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini, bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, tetapi Goulet (Todaro, 1981) dalam (Dr. Aprilia Theresia, dkk: 2014) mengemukakan sedikitnya tiga nilai yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan, keamanan, rekreasi. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
- b. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesepakatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

Oleh sebab itu, di dalam istilah pembangunan, terkandung begitu banyak pokok-pokok pikiran, yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang terus-menerus mengalami perubahan-perubahan.
- b. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau given, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko yang dihadapi.
- c. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu *eco-development* yang tidak hanya berupa perubahan ekonomi.

Pembangunan juga mencakup dehumanisasi kultural dan perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial politik tertentu.

Dengan demikian, pembangunan bukanlah semata-mata bersifat ekonomi yang berupa kenaikan pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan serta hal-hal lain yang dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, melainkan mencakup

banyak aspek non-materil seperti: penentuan nasib sendiri, swadaya, kemerdekaan, dan pengayoman politik, partisipasi, identitas kultural, kepribadian nasional. Berkaitan dengan itu, esensi setiap kegiatan pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk memproyeksikan diri ke dalam situasi lain dan karena itu secara sadar dan terencana menyiapkan diri untuk melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki mutu hidupnya guna mengantisipasi keadaan dan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang.

- d. Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri mengambil keputusan untuk memilih alternatifterbaik yang dapat dilaksanakan demi perbaikan mutu hidup.
- e. Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pembangunan mensyaratkan melibatkan atau partisipasi seluruh warga masyarakat sejak pengambilan keputusan tentang perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat. Pembangunan, bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, tetapi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh warga masyarakat. Dalam pengertian pemerintah maupun masyarakat, termasuk di dalamnya adalah para tenaga-tenaga penyuluh atau *change agent* yang dapat berupa aparat

pemerintah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, pekerja sosial atau para inovator dan tokoh-tokoh (informal) masyarakat.

- f. Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia (dan masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Pengorbanan dalam pembangunan memang sesuatu yang wajar terjadi, tetapi melalui pengorbanan yang diberikan itu, mereka harus memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (baik ekonomis maupun non-ekonomis) yang lebih besar dibanding pengorbanan yang telah diberikan. Di lain pihak, juga harus jelas, bahwa yang berkorbanlah yang harus lebih diutamakan sebagai penerima utama manfaat atau hasil pembangunan, bukan sebaliknya, yang berkorban memang sengaja dikorbankan demi kepentingan pihak lain yang justru tidak pernah mengeluarkan pengorbanan apapun.

Untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana disebutkan diatas, pembangunan memerlukan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan dan kemajuan teknologi-teknologi tertentu yang sebelumnya telah dipilih (Margono Slamet, 1985), sehingga seluruh sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perbaikan mutu hidup masyarakat.

Melalui penerapan teknologi-teknologi yang terpilih seperti itu, dimaksudkan pula agar pembangunan dapat dilaksanakan terus menerus sampai waktu yang tidak terbatas. Sebaliknya, penggunaan atau penerapan teknologi tertentu, harus dijaga agar sumberdaya yang diperlukan senantiasa tersedia secara lestari, dan jangan sampai justru merusak kesinambungan tersedianya sumberdaya

yang pada gilirannya justru akan merusak atau menurunkan mutu hidup generasi mendatang.

Selaras dengan pengertian-pengertian diatas, maka secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (MardikantoS, 2009) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa. Rahim (Scrhramm dan Lerner, 1976) dalam (Dr. Aprilia Theresia, dkk: 2014) mengungkapkan bahwa, di dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau sub sistem pelaku-pelaku pembangunan, yang terdiri dari:

1. Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga), pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini, sedang kelompok elit masyarakat hanya berfungsi sebagai penerjema kebijakan dan perencanaan pembangunan sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Slamet (dalam Suryono, 2001) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam

kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980 melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat. Menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang *alternative* solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Melalui pendekatan partisipasi, masyarakat dapat memiliki pengaruh dan kontrol terhadap berbagai pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang ada pada desa. Pembangunan ekonomi selalu ditunjukkan untuk mempertinggi

kesejahteraan, kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di desa Wololele A, selalu dipandang sebagai usaha pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun, Kepala Keluarga, Jenis Kelamin

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah	Persen (%)
			L	P		
1	Aetungu	29	57	53	110	14,92
2	Wololele A	65	111	121	232	31,48
3	Wolofai	43	68	86	154	20,90
4	Tebolaka	31	120	121	241	32,70
Jumlah Jiwa		168	356	381	737	100 %

Sumber : Data Penduduk. 2020

Berdasarkan tabel diatas, Desa Wololele A terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Wololele A dengan jumlah penduduk 232 jiwa, Dusun Aetungu 110 Jiwa, Dusun Wolofai 154 jiwa dan Dusun Tebolaka 241 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk jika digabungkan menjadi 737 jiwa, maka total penduduk Desa Wololele A adalah 737. Sebagai fujud adanya partisipasi masyarakat Desa Wololele A saat ini, telah dibangun berbagai infrastruktur seperti gedung posyandu, rumah ibadah/gereja, sekolah dasar (SD), kantor desa, deker, selokan air dan jalan usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pembangunan didesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Sebagai suatu tolak ukur bahwa proses pembangunan desa melibatkan semua masyarakat dalam proses pngambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“ **Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Wololele A Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Wololele a Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende terhadap pembangunan Desa ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wololele a Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende?

2.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dianalisis adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wololele a Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wololele a Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende

2.4 Manfaat Penelitian

2.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu pembangunan desa.
2. Sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang peneliti dapat dibangku perkuliahan.

2.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa khususnya desa Wololele a dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang khususnya pada pembangunan di desa Wololele A Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian.